

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pendapatan Asli Daerah, Merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah tersebut. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang di peroleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemda untuk mensejahterakan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu memerlukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu 22,64 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan

fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Melihat fenomena yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pertumbuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum berorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata.

Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”. UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep multiterm expenditure framework (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan asset

tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan.

Penelitian yang dilakukan Pungky Ardhani (2011) Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007-2009 Hasil penelitian tersebut ialah secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini untuk mengetahui **pengaruh PAD, DAU dan SILPA terhadap Belanja Modal pada kabupaten sabu rajjua**

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan Masalah dalam penelitan ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Sabu Rajjua

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka yang menjadi persoalan penelitiannya adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada kabupaten sabu rajjua?

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja Pada modal kabupaten sabu rajjua?
3. Apakah Silpa berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten Sabu Raijua?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten sabu rajjua
2. Untuk mengetahui apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten sabu rajjua
3. Untuk mengetahui apakah Silpa berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten Sabu Raijua

1.4.1 Manfaat

1.4.1.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembang ilmu pengetahuan mengenai topik terkait.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.4.1.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Silpa terhadap belanja modal.
- b. Bagi peneliti
Menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Silpa pada Kabupaten Sabu Raijua